

ANALISIS PRAGMATIK DALAM WACANA KAMPANYE POLITIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PERIODE 2013-2018

Isriani Hardini

Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan
isreehar@yahoo.com

Abstract: This descriptive study discusses the political campaign discourse from a pragmatic angle. The aspects that were examined include speech acts, implicatures, speech meaning, and an effective political campaign discourse form for the community. Data were in the form of billboards and banners of political campaign election of Central Java Governor and Deputy Governor period 2013-2018. There are three main findings of this study. *First*, speech acts used are speech acts directly and indirectly. *Second*, most of the speech does not meet the maxim of quality, quantity, relevance, and implementation. Only partial utterances who have fulfilled the maxim of relevance. *Third*, the purpose of speech is ordered or choose and insinuate or criticize.

Kata Kunci: pragmatik, wacana, tindak tutur, maksim

PENDAHULUAN

Setiap informasi yang dituturkan oleh komunikator selalu memiliki maksud terselubung. Oleh karena itu, setiap manusia harus memahami maksud dan makna tuturan yang diucapkan oleh lawan tuturnya. Dalam hal ini tidak hanya sekedar mengerti apa yang telah diucapkan oleh si penutur, tetapi juga konteks yang digunakan dalam ujaran tersebut harus dipahami.

Dalam linguistik terdapat suatu cabang ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu yang disebut pragmatik (Nadar, 2009: 2). Menurut Leech dalam Rohmadi (2004: 2), pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam

komunikasi dan bagaimana pragmatik menyelidiki makna sebagai konteks, bukan sebagai sesuatu yang abstrak dalam komunikasi.

Dalam kajian ilmu pragmatik juga dibahas tentang implikatur. Salah satu aplikasi bahasa sebagai alat komunikasi adalah implikatur dalam wacana kampanye politik. Implikatur adalah sesuatu yang diimplikasikan dalam suatu ujaran atau pernyataan (Nadar, 2009: 60). Dalam rangka memahami apa yang dimaksudkan oleh seorang penutur, lawan tutur harus selalu melakukan interpretasi pada tuturan-tuturannya.

Dilihat dari sudut pandang pragmatik, dalam kampanye politik banyak implikatur di balik janji-janji yang disampaikan kepada rakyat. Pada dasarnya wacana kampanye politik ini lekat dengan situasi politik partai yang terkait dengan dukung-mendukung. Hal ini dijumpai ketika adanya pemilihan umum baik pemilihan presiden dan wakilnya, calon legislatif, dan pemilihan umum kepala daerah. Tahun 2013 memiliki arti penting bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah karena pada tanggal 26 Mei 2013 akan diadakan pemilihan umum calon gubernur dan wakil gubernur yang diawali dengan kampanye yang sangat menarik.

Perubahan sistem pemilihan yang ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang berbasis pada perolehan suara telah membuat para calon kepala daerah mengubah strategi. Sistem perolehan suara terbanyak membawa atmosfer kompetisi yang semakin ketat. Tidak hanya dengan partai lawan, tetapi juga dengan rekan separtai, kekuatan figur menjadi sangat penting. Salah satu cara memperkenalkan figur tersebut melalui berbagai atribut kampanye yang dianggap simbol representasi calon kepala daerah. Meskipun tidak memberikan pengaruh signifikan, baliho atau spanduk digunakan para calon kepala daerah untuk mencitrakan dirinya dengan menggunakan kata-kata atau gambar yang menarik (Sianturi, 2011: 3).

Kajian implikatur dianggap penting karena terikat konteks untuk menjelaskan maksud implisit dari tindak tutur penuturnya. Dengan demikian, praanggapan lawan tutur bermacam-macam bergantung pada referensi dan pemahaman konteks yang dimilikinya. Untuk memahami bentuk-bentuk bahasa yang implikatif perlu adanya pengkajian dan analisis yang mendalam. Selain itu, dalam mengkaji dan menganalisis diperlukan kepekaan dengan konteks yang melingkupi peristiwa kebahasaan itu agar maksud terselubung di balik wacana kampanye politik benar-benar dimengerti oleh masyarakat.

Dengan melihat secara khusus teks-teks yang digunakan dalam wacana kampanye politik saat ini, dapat disimpulkan tentang kedudukan

bahasa dalam kampanye tersebut. Bahasa dalam wacana kampanye politik berdiri sebagai sesuatu yang harus dibaca dan dilihat. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam wacana kampanye politik mempengaruhi cara berpikir pembaca. Untuk dapat mempengaruhi pembaca, wacana kampanye politik biasanya ditampilkan dengan suatu gaya pengungkapan yang khas. Kekhasan dari wacana kampanye itu sangat menarik.

Dalam memahami implikatur dalam wacana kampanye politik pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013- 2018 ini, pembaca sangat terbantu dengan adanya ilustrasi gambar dengan berbagai karakter, ukuran, dan penguatan kata-kata. Kedudukan gambar cukup penting dalam menarik perhatian khalayak karena lebih mudah diingat daripada kata-kata yang mempunyai banyak maksud yang bisa digali di dalamnya. Salah satu kekhasan gambar adalah sebagai alat ungkap pesan secara visual menawarkan kesempatan luas untuk didayagunakan sebagai alat memperjelas pesan, mudah dimengerti, menarik perhatian dalam rangka mengajak sesuatu maksud atau gagasan kepada khalayak. Dengan demikian, aspek desain komunikasi visual dalam rangkaian wacana kampanye politik pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013- 2018 merupakan upaya persuasif bersifat mengajak, menginformasikan, menegaskan, dan menyuruh atau memerintah, sedangkan tujuannya untuk mempengaruhi pembaca, merangsang perhatian, menimbulkan tindakan, merangsang tindakan, supaya memilih sesuai dengan kehendak pembaca.

Bentuk wacana kampanye politik pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 pada baliho dan spanduk juga tidak terlepas dari tindak tutur dan maksud tuturan. Tuturan wacana kampanye politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013- 2018 memiliki keunikan tersendiri dan sangat menarik untuk diteliti karena banyak pesan-pesan yang dapat diungkapkan di dalamnya. Dengan alasan inilah peneliti tertarik untuk mengangkat “Analisis Pragmatik dalam Wacana Kampanye Politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2018” sebagai judul penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penanganan bahasa menurut beberapa tahapan strateginya yang terdiri atas tiga macam tahapan. Pada *tahap pertama*, hal yang dilakukan adalah menjaring data sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan tema penelitian. Data penelitian ini berupa satuan lingual yang terdapat dalam wacana kampanye politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah periode 2013-2018 pada spanduk dan baliho yang dipasang di jalan. Data tersebut diperoleh dengan teknik observasi, dilanjutkan dengan teknik rekam (difoto), dan teknik catat. Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. *Tahap kedua*, yaitu analisis pragmatik berupa implikatur dan tindak tutur dalam wacana kampanye politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Metode yang digunakan adalah metode padan pragmatis, yaitu metode yang alat penentunya adalah mitra wicara. Untuk menganalisis implikatur digunakan teori Grice. Sementara tindak tutur akan dianalisis dengan menggunakan teori Wijana. *Tahap ketiga*, yaitu penyajian hasil analisis data. Hasil analisis yang diperoleh dipaparkan dengan metode penyajian informal, yaitu dengan perumusan kata-kata biasa.

HASIL PENELITIAN

Analisis Tindak Tutur

Untuk menemukan implikatur yang terdapat pada suatu ujaran dibutuhkan kaidah pertuturan. Tindak tutur (*speech act*) adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu (Chaer, 1995: 65).

Bentuk wacana kampanye politik pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 diwujudkan dalam baliho dan spanduk. Dalam baliho dan spanduk itu terdapat tindak tutur berupa kata, kalimat, klausa, atau paragraf. Berikut ini adalah pembahasannya.

Tindak Tutur Langsung

Tindak tutur ini merupakan tuturan yang sesuai dengan modus kalimatnya. Misalnya, kalimat berita untuk memberitakan, kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, ataupun memohon, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Berikut ini adalah data yang berisi tindak tutur langsung.

- (1) *Ayo padha milih Ganjar-Heru men Jawa Tengah tambah maju* (Ayo pilihlah Ganjar-Heru agar Jawa Tengah tambah maju)

Kalimat ini terdapat pada baliho pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko dari PDIP. Wacana yang terdapat dalam baliho tersebut berupa kalimat perintah dalam bahasa Jawa. Kalimat (1) merupakan tindak tutur langsung yang diungkapkan menjadi kalimat perintah. Kalimat perintah yang digunakan merupakan kalimat ajakan yang ditunjukkan dengan kata ajakan, yaitu *ayo*. Dalam kalimat (1) tersebut, penutur bermaksud untuk mengajak lawan tutur agar memilih Ganjar-Heru menjadi Cagub dan Cawagub Jateng.

- (2) *Milih iki wae ngajeni lan ngayomi* (Pilih ini saja menghormati dan mengayomi)

Kalimat ini terdapat pada spanduk pasangan Hadi Prabowo dan Don Murdono. Wacana yang terdapat dalam spanduk tersebut berupa kalimat perintah dalam bahasa Jawa. Kalimat (2) merupakan tindak tutur langsung yang diungkapkan dalam kalimat perintah. Kalimat perintah yang digunakan merupakan kalimat suruh yang sebenarnya. Dalam kalimat (2) tersebut, penutur bermaksud untuk menyuruh lawan tutur agar memilih yang menghormati dan mengayomi, yaitu Hadi Prabowo dan Don Murdono.

- (3) *Lanjutkan...!! Bali ndeso mbangun deso.*

Kalimat ini terdapat pada spanduk pasangan Bibit Waluyo dan Sudijono. Wacana yang terdapat dalam spanduk tersebut berupa kalimat perintah dalam bahasa Indonesia. Kalimat (3) merupakan tindak tutur langsung yang diungkapkan dalam kalimat perintah. Kalimat perintah yang digunakan merupakan kalimat suruh yang sebenarnya. Dalam kalimat (3) tersebut, penutur bermaksud untuk menyuruh lawan tutur agar melanjutkan kinerja Gubernur *incumbent*, yaitu Bibit Waluyo dengan Cawagubnya yang baru, Sudijono. Dalam wacana tersebut juga terdapat slogan pasangan tersebut berupa klausa bahasa Jawa, yaitu *Bali ndeso mbangun deso* yang artinya “Kembali ke desa membangun desa”. Slogan ini sebenarnya sudah pernah digunakan oleh Bibit Waluyo ketika masa pencalonan pada periode sebelumnya.

Tindak Tutur Tidak Langsung

Tindak tutur ini merupakan tuturan yang tidak sesuai dengan modus kalimatnya. Maksud dari tindak tutur tidak langsung dapat beragam dan tergantung pada konteksnya. Berikut ini merupakan data berupa tindak tutur tidak langsung dalam wacana kampanye politik pemilihan Cagub dan Cawagub Jawa Tengah periode 2013-2018.

- (4) *Komunitas Angkutan Banjarnegara mendukung Mas HP (Hadi Prabowo) Jadi Gubernur Jawa Tengah 2013-2018.*

Kalimat ini terdapat pada baliho pasangan Hadi Prabowo. Wacana yang terdapat dalam baliho tersebut berupa kalimat berita dalam bahasa Indonesia. Kalimat (4) merupakan tindak tutur tidak langsung yang diungkapkan dalam kalimat berita. Adapun kalimat berita tersebut memiliki maksud untuk menyuruh lawan tutur memilih Hadi Prabowo sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018.

(5) *Saatnya Jateng baru pemimpin baru.*

Kalimat ini terdapat pada baliho pasangan Ganjar-Heru. Wacana yang terdapat dalam baliho tersebut berupa kalimat berita dalam bahasa Indonesia. Kalimat (5) merupakan tindak tutur tidak langsung yang diungkapkan dalam kalimat berita. Adapun kalimat berita tersebut memiliki maksud untuk menyuruh lawan tutur memilih Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018.

Ganjar Pranowo yang merupakan anggota DPR RI merupakan orang baru dalam pemerintahan masa kepemimpinan Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jawa Tengah saat ini, sedangkan Heru Sudjatmoko merupakan bupati Purbalingga saat ini. Oleh karena itu, pasangan nomor urut 3 ini berani mengusung slogan *Saatnya Jateng baru pemimpin baru* karena pasangan ini merasa berbeda dengan pasangan lain yang masih terkait dengan pemerintahan sekarang, seperti Bibit Waluyo (Gubernur Jawa Tengah) dan Hadi Prabowo (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah).

Analisis Implikatur

Proses komunikasi terbentuk karena peserta-peserta tutur mematuhi secara ketat prinsip kerja sama yang oleh Grice dijabarkan atas empat maksim. Maksim adalah aturan pertuturan dalam tuturan yang wajar. Berikut ini adalah analisis maksim-maksim kerja sama Grice dalam wacana kampanye politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018.

1) *Jakwire Dewek*

Frase ini terdapat pada baliho Hadi Prabowo. Frasa tersebut merupakan bahasa Jawa dialek Tegal yang artinya temannya sendiri.

Tuturan *Jakwire Dewek* dalam baliho tersebut tidak memenuhi maksim kualitas yang menuntut peserta tutur untuk berkata benar. Dalam tuturan tersebut, penutur bermaksud menyampaikan bahwa Hadi Prabowo, Calon Gubernur Jawa Tengah merupakan temannya sendiri. Padahal, pada kenyataannya masyarakat yang membaca baliho tersebut belum tentu mengenal sosok calon gubernur tersebut.

Tuturan tersebut juga tidak memenuhi maksim kuantitas yang menuntut penuturnya memberikan kontribusi sesuai yang diminta. Dalam tuturan tersebut penutur tidak memberikan informasi yang

jelas kepada lawan tutur. Maksud dari tuturan tersebut tidak langsung dapat dipahami oleh pembaca.

Tuturan tersebut juga tidak memenuhi maksim relevansi yang menuntut adanya relevansi dalam tuturan antara pembicaraan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Masalah yang diangkat adalah mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018, tetapi tuturan yang disampaikan tidak ada ajakan atau imbauan untuk memilih Hadi Prabowo sebagai Cagub Jawa Tengah periode 2013-2018.

Tuturan tersebut tersebut juga tidak memenuhi maksim pelaksanaan yang mengharuskan peserta tutur untuk memberikan kontribusi tuturan yang runtut, tidak ambigu, tidak taksa, dan tidak berlebihan. Frasa *Jakwire Dewek* ini dipilih sebagai slogan kampanye karena baliho ini dipasang di wilayah Kabupaten dan Kota Tegal. Penutur berasumsi jika menggunakan bahasa daerah lebih mengkratkan kepada penduduk setempat. Akan tetapi, bagi penduduk di luar daerah Kabupaten dan Kota Tegal yang tidak tahu bahasa Jawa dialek Tegal akan kesulitan memahami arti dari frasa tersebut. Oleh karena itu, tuturan ini tidak memenuhi maksim pelaksanaan.

2) Wacana berupa kalimat deklaratif, kalimat perintah, dan frasa pada spanduk pasangan Ganjar-Heru.

- (1) *Mohon doa restu dan dukungannya masyarakat Jawa Tengah.*
- (2) *Ayo milih 3 Ganjar & Heru biar jadi Gubernur Jawa Tengah & Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk membangun propinsi Jawa Tengah yang lebih baik.*
- (3) *Mboten korupsi-mboten ngapusi*

Tuturan pada kalimat (1) merupakan tuturan yang mengandung maksud memohon doa restu serta dukungan masyarakat Jawa Tengah. Pada kalimat (1), informasi yang disebutkan tidak memenuhi maksim kualitas karena dalam kalimat tersebut tidak disampaikan secara jelas siapa dan sebagai apa yang akan didukung oleh masyarakat Jawa Tengah. Padahal, dalam maksim kualitas, penutur dituntut untuk berkata benar. Dengan demikian, kalimat tersebut tidak memenuhi maksim kualitas.

Tuturan pada kalimat (2) merupakan kalimat perintah yang bermaksud mengajak pembaca selaku lawan tutur untuk memilih Ganjar & Heru sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

agar Jawa Tengah menjadi lebih baik. Tuturan tersebut tidak memenuhi maksim kualitas karena Ganjar & Heru belum terbukti dapat membangun provinsi Jawa Tengah menjadi lebih baik. Tuturan pada kalimat (2) hanya sebatas ajakan saja.

Frasa *mboten korupsi-mboten ngapusi* merupakan ko-teks berupa frasa dalam bahasa Jawa yang artinya ‘Tidak korupsi-Tidak Berbohong’. Frasa tersebut merupakan slogan kampanye pasangan Ganjar-Heru. Tuturan tersebut memiliki risiko yang berat. Penutur (Ganjar-Heru) harus memiliki bukti terlebih dahulu mengenai latar belakang mereka yang tidak pernah terlibat korupsi dan tidak pernah berbohong. Tuturan ini menjadi efektif, jika penutur mampu menunjukkan bukti-bukti atas pernyataan dalam tuturan itu. Oleh karena itu, tuturan ini belum memenuhi maksim kualitas yang mewajibkan penutur berkata benar.

Tuturan kalimat (1) tidak memenuhi maksim kuantitas karena informasi yang diberikan tidak jelas. Kalimat (1) konteksnya belum jelas sehingga kalimat (2) harus dibaca juga. Dengan demikian, maksud penutur dapat tersampaikan. Kalimat *Mohon doa restu dan dukungannya masyarakat Jawa Tengah* masih belum jelas karena yang mau didukung itu siapa dan sebagai apa tidak dijelaskan dalam kalimat tersebut.

Tuturan kalimat (2) juga tidak memenuhi maksim kuantitas karena informasinya masih ada yang kurang jelas. Tuturan tersebut tidak menjelaskan seperti apa bentuk konkret untuk membangun provinsi Jawa Tengah yang lebih baik sehingga membuat pembaca bingung dan akan bertanya-tanya. Informasi yang kurang jelas ini menyebabkan penutur melanggar maksim kuantitas karena maksim ini mewajibkan peserta tutur untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai.

Frasa *mboten korupsi-mboten ngapusi* belum memenuhi maksim kuantitas yang mewajibkan peserta tutur memberikan informasi yang jelas dan memadai. Tuturan tersebut tidak menjelaskan dari sisi apa pasangan Ganjar-Heru tidak korupsi dan tidak berbohong.

Kalimat (1), (2), dan frasa (3) telah memenuhi maksim relevansi karena tuturan yang disampaikan ada relevansinya dengan masalah yang sedang dibicarakan. Masalah yang diangkat adalah mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018.

Kalimat (1) tidak memenuhi maksim pelaksanaan karena informasinya tidak runtut dan kurang jelas. Hal ini dapat dilihat dari penutur ingin meminta doa restu dan dukungan kepada masyarakat Jawa Tengah, tetapi siapa dan sebagai apa tidak disebutkan dalam kalimat tersebut.

Kalimat (2) tidak memenuhi maksim pelaksanaan karena tuturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik. Padahal, untuk memenuhi maksim pelaksanaan, peserta tutur wajib memberikan kontribusi tuturan yang runtut, tidak ambigu, tidak taksa, dan tidak berlebihan.

Frasa *mboten korupsi-mboten ngapusi* juga belum memenuhi maksim pelaksanaan. Tuturan tersebut tidak memberikan penjelasan dari hal apa pasangan ini tidak korupsi dan tidak berbohong.

- 3) Klausa bahasa Jawa *bali ndeso mbangun ndeso* (kembali ke desa membangun desa) dan kalimat deklaratif *Wong tani milih pemimpin tani* (Orang tani memilih pemimpin tani) terdapat pada spanduk pasangan Bibit Waluyo dan Sudijono.

Tuturan berupa klausa *bali ndeso mbangun ndeso* dijadikan slogan kampanye oleh pasangan ini. Tuturan tersebut tidak memenuhi maksim kualitas karena tuturannya tidak disampaikan secara jelas siapa yang kembali ke desa untuk membangun desa. Tuturan tersebut mengandung implikasi bahwa pasangan inilah yang bersedia kembali ke desa dan membangun desa. Pasangan lain tidak akan kembali ke desa dan membangun pedesaan. Slogan ini belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tuturan tersebut tidak memenuhi maksim kualitas yang menuntut penutur untuk berkata benar.

Tuturan berupa kalimat *Wong tani milih pemimpin tani* juga tidak memenuhi maksim kualitas. Jika membaca tuturan tersebut, lawan tutur menganggap bahwa pasangan ini berlatar belakang dari bidang pertanian. Padahal, pasangan ini tidak ada yang berlatar belakang dari bidang pertanian. Bibit Waluyo berlatar belakang militer, sedangkan Sudijono merupakan akademisi di bidang Hukum Agraria yang menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang. Dengan demikian, maksim kualitas yang menuntut penutur untuk berkata benar tidak dapat dipenuhi sehingga terdapat penyimpangan pada prinsip kerja sama ini.

Tuturan *bali ndeso mbangun ndeso* tidak memenuhi maksim kuantitas karena informasi yang diberikan tidak jelas dan kontribusi

kepada pembaca kurang memadai. Tuturan ini tidak menjelaskan siapa yang kembali ke desa untuk membangun desa, kemudian desa mana yang akan dibangun juga tidak diinformasikan secara jelas. Kalau melihat dari konteksnya, wilayah Jawa Tengah yang dapat dibangun tidak hanya pedesaan saja, ada juga wilayah perkotaan. Jadi, tuturan ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi pembangunan wilayah. Dengan demikian, tuturan ini melanggar maksim kuantitas karena tidak memberikan informasi yang jelas dan memadai.

Tuturan *Wong tani milih pemimpin tani* juga tidak memenuhi maksim kuantitas. Tuturan tersebut belum memberikan informasi yang jelas dan memadai. Frasa *pemimpin tani* ditujukan kepada siapa juga tidak jelas. Sepengetahuan masyarakat, pasangan ini tidak ada yang berlatar belakang petani atau bidang pertanian. Masyarakat yang dikategorikan *wong tani* juga tidak dijelaskan. Dengan demikian, pembaca masih bertanya-tanya apa maksud di balik tuturan tersebut.

Tuturan *bali ndeso mbangun ndeso* dan *Wong tani milih pemimpin tani* tidak memenuhi maksim relevansi karena tuturan yang disampaikan tidak ada relevansinya dengan masalah yang sedang dibicarakan. Masalah yang diangkat adalah mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Kedua tuturan tersebut hanya menginformasikan saja, tidak ada tuturan yang mengajak atau menyuruh pembaca untuk memilih pasangan ini.

Tuturan *bali ndeso mbangun ndeso* tidak memenuhi maksim pelaksanaan karena informasinya tidak runtut dan kurang jelas. Tuturan tersebut tidak menjelaskan siapa yang kembali ke desa untuk membangun desa, desa mana yang akan dibangun, dan tujuannya untuk apa. Tuturan tersebut menimbulkan ketaksan dan kurang jelas maksudnya. Dengan demikian, tuturan tersebut telah melanggar maksim pelaksanaan.

Tuturan *Wong tani milih pemimpin tani* tidak memenuhi maksim pelaksanaan karena tuturan tersebut tidak menjelaskan yang dikategorikan *wong tani* itu seperti apa dan siapa pemimpin tani itu tidak dijelaskan. Tuturan ini seolah-olah membatasi yang boleh memilih hanya *wong tani* saja, padahal, profesi masyarakat itu bervariasi. Tuturan ini juga membatasi *wong tani* hanya boleh memilih pemimpin tani. Tuturan ini juga hanya ditujukan untuk *wong tani* saja, bukan untuk masyarakat luas. Dengan demikian, tuturan ini telah melanggar maksim pelaksanaan yang mewajibkan peserta tutur memberikan

kontribusi tuturan yang runtut, tidak ambigu, tidak taksa, dan tidak berlebihan.

Maksud Tuturan

Setiap tuturan yang disampaikan penutur kepada lawan tuturnya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Maksud yang diutarakan oleh seorang penutur tidak selamanya diutarakan secara langsung, adakalanya diutarakan secara tidak langsung. Maksud yang tidak langsung akan lebih sulit penafsirannya dibandingkan dengan maksud yang langsung. Oleh karena itu, lawan tutur harus memperhatikan konteks yang melingkupi tuturan tersebut (Rohmadi, 2004: 102).

Berdasarkan pengamatan peneliti, maksud tuturan dalam wacana kampanye politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 adalah sebagai berikut.

Bermaksud menyuruh atau memilih

Maksud menyuruh atau memilih terdapat pada spanduk pasangan Ganjar-Heru dengan tuturan *Pilih dulu! Terbukti korup, kita turunkan rame-rame* dengan ko-teks (teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya) *Ganjar-Heru/Gagah*. Tuturan pada kalimat tersebut bermaksud untuk memerintah yang disampaikan secara langsung. Tindak tutur yang disampaikan tersebut merupakan tindak tutur direktif.

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar pembaca melakukan tindakan seperti yang disebutkan penulis, misalnya menyuruh, memohon, menyarankan, menantang, dan lain sebagainya (Rohmadi, 2004: 104). Tuturan pada gambar 10 merupakan tindak tutur direktif yang menyuruh pembaca (masyarakat Jawa Tengah) untuk memilih dulu Ganjar-Heru, kalau terbukti korupsi silakan diturunkan bersama-sama. Tuturan ini mengandung risiko, kalau memang nantinya Ganjar-Heru terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018, masyarakat berhak untuk menurunkan mereka. Tuturan ini menjadi janji kampanye calon pasangan ini sehingga Ganjar-Heru harus konsisten terhadap tuturan yang mereka sampaikan.

Bermaksud menyindir atau mengkritik

Maksud menyindir atau mengkritik terdapat pada spanduk yang berisi tuturan berupa frasa *muda-bersih-melayani* dengan ko-teks Ganjar Pranowo Cagub Jateng 2013-2018. Tuturan tersebut tindak tutur tidak

langsung yang bertujuan untuk menyindir atau mengkritik. Hal itu dapat terlihat dari pemilihan kata yang digunakan dalam tuturan tersebut, yaitu *muda-bersih-melayani*.

Kata *muda* digunakan karena Ganjar Pranowo sebagai Cagub Jateng 2013-2018 merupakan Cagub termuda dibandingkan dengan Cagub yang lain. Hal tersebut merupakan sindiran untuk calon gubernur yang lain perihal usia. Kata *bersih* dipilih oleh penulis karena selama berkarir sebagai anggota DPR RI, Ganjar Pranowo tidak pernah terlibat kasus korupsi. Kata *melayani* dipilih penulis karena Ganjar Pranowo sebagai Cagub Jateng akan berusaha melayani dengan sepenuh hati kebutuhan masyarakat jika nanti terpilih menjadi Gubernur Jateng periode 2013-2018.

Bentuk Wacana Kampanye Politik yang Efektif bagi Masyarakat

Berbahasa adalah aktivitas sosial. Seperti halnya aktivitas-aktivitas sosial yang lain, kegiatan berbahasa baru terwujud apabila manusia terlibat di dalamnya. Dalam berkomunikasi, penutur dan lawan tutur sama-sama menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Setiap peserta tindak tutur bertanggung jawab terhadap tindakan dan penyimpangan terhadap kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual (Allan dalam Wijana, 1996: 45).

Dalam berkomunikasi, penutur mengomunikasikan tuturannya dengan tujuan agar lawan tuturnya memahami apa yang dikomunikasikan itu. Penutur selalu berusaha agar tuturannya selalu relevan dengan konteks, jelas, dan mudah dipahami, padat dan ringkas, dan selalu pada persoalan. Oleh karena itu, agar proses komunikasi berjalan lancar ada prinsip kerja sama yang harus dilakukan oleh penutur dan lawan tutur.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, baliho atau spanduk yang menjadi alat kampanye politik harus mematuhi prinsip kerja sama agar proses komunikasi berjalan lancar. Grice dalam Soemarmo (1987) mengemukakan bahwa untuk menggunakan bahasa secara efektif dan efisien diperlukan kaidah penggunaan bahasa. Kaidah ini terdiri dari 2 pokok, yaitu (1) prinsip koperatif yang menyatakan “katakan apa yang diperlukan pada saat terjadinya percakapan itu dengan memegang tujuan dari percakapan itu”; (2) empat maksim percakapan yang terdiri dari maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan.

Proses komunikasi terbentuk karena peserta-peserta tutur mematuhi secara ketat prinsip kerja sama yang oleh Grice dijabarkan atas empat maksim. Maksim adalah aturan pertuturan dalam tuturan yang wajar. Keempat maksim yang dimaksud oleh Grice adalah sebagai berikut (dalam Rohmadi, 2004: 18).

- a. Maksim Kualitas (*Maxim of Quality*)
Maksim kualitas adalah aturan pertuturan yang menuntut setiap peserta tutur untuk berkata benar.
- b. Maksim Kuantitas (*Maxim of Quantity*)
Maksim kuantitas adalah aturan pertuturan yang menuntut setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya sesuai yang diminta.
- c. Maksim Relevansi (*Maxim of Relevance*)
Maksim relevansi adalah aturan pertuturan yang menuntut adanya relevansi dalam tuturan antara pembicaraan dengan masalah yang sedang dibicarakan.
- d. Maksim Pelaksanaan (*Maxim of Manner*)
Maksim pelaksanaan adalah aturan pertuturan yang mengharuskan peserta tutur untuk memberikan kontribusi tuturan yang runtut, tidak ambigu, tidak taksa, dan tidak berlebihan.

Leech (1983) berpendapat bahwa selain keempat maksim tersebut, dalam prinsip kerja sama masih diperlukan prinsip kesopanan yang terjabar dalam enam maksim, yaitu sebagai berikut.

- a. Maksim Kebijaksanaan (*Tact Maxim*)
Maksim ini merupakan aturan dalam pertuturan dengan cara meminimalkan kerugian terhadap lawan tutur dan memaksimalkan keuntungan bagi lawan bicara.
- b. Maksim Kemurahan (*Generosity Maxim*)
Maksim ini merupakan pertuturan dengan meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri dan memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri.
- c. Maksim Kerendahan Hati (*Modesty Maxim*)
Maksim ini adalah aturan dalam pertuturan dengan memaksimalkan ketidakhormatan terhadap diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat terhadap diri sendiri.
- d. Maksim Kecocokan (*Agreement Maxim*)
Maksim ini berupa aturan dalam pertuturan dengan memaksimalkan kesetujuan terhadap orang lain.

e. Maksim Kesimpatian (*Symphaty Maxim*)

Maksim ini berupa aturan dalam pertuturan dengan memaksimalkan rasa simpati kepada orang lain dan meminimalkan rasa antipati kepada orang lain.

f. Maksim Penerimaan atau Pujian (*Approbation Maxim*)

Maksim ini berupa aturan pertuturan yang meminimalkan ketidak-hormatan terhadap orang lain dan memaksimalkan pujian kepada orang lain.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, wajar rasanya jika terdapat spanduk atau baliho yang bermaksud untuk mengajak, memilih, atau menyindir salah satu kandidat calon kepala daerah. Hal itu karena kampanye politik merupakan ajang promosi sekaligus meminta dukungan kepada masyarakat untuk memilih calon kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagian besar wacana kampanye politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 yang terdapat pada media luar ruang seperti spanduk dan baliho masih belum memenuhi keempat maksim dalam prinsip kerja sama. Padahal, jika penutur dalam hal ini tim sukses masing-masing kandidat memenuhi maksim-maksim tersebut, akan terbentuk wacana kampanye politik yang efektif sehingga masyarakat sebagai lawan tutur memahami dan menangkap maksud dan tujuan penutur.

Untuk menghasilkan wacana kampanye politik yang efektif, penutur dapat menyampaikan visi, misi, dan program unggulan calon kepala daerah. Penutur (dalam hal ini tim sukses calon kepala daerah) dapat membuat baliho atau spanduk yang berisi informasi tersebut. Jika informasi tersebut dituliskan dalam baliho atau spanduk, masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang akan ditawarkan masing-masing calon kepala daerah apabila nanti terpilih menjadi kepala daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat berpikir kritis dan cerdas dalam memilih calon kepala daerahnya berdasarkan program-program yang ditawarkan.

Salah satu faktor kemenangan Ganjar-Heru di Pilgub Jawa Tengah ini adalah adanya program unggulan yang menjadi slogan selama kampanye, yaitu *mboten korupsi lan mboten ngapusi*. Slogan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena saat ini masyarakat sudah geram dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Dengan adanya janji kampanye Ganjar-Heru, yaitu *mboten korupsi lan mboten ngapusi* menjadi nilai plus bagi pasangan ini. Jika nanti Ganjar-

Heru terpilih, pasangan ini harus menepati janjinya untuk tidak korupsi dan tidak berbohong kepada warga Jawa Tengah. Gerak-gerik pasangan ini pasti akan menjadi sorotan masyarakat.

KESIMPULAN

Wacana kampanye politik pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 diwujudkan dalam baliho dan spanduk. Dalam baliho dan spanduk itu terdapat tindak tutur langsung dan tidak langsung.

Dalam analisis implikatur, hampir sebagian besar tuturan dalam spanduk atau baliho tidak memenuhi maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan pelaksanaan. Hanya sebagian tuturan saja yang telah memenuhi maksim relevansi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, maksud tuturan dalam wacana kampanye politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 adalah bermaksud menyuruh atau memilih dan menyindir atau mengkritik.

Untuk membentuk wacana kampanye politik yang efektif bagi masyarakat, penutur harus memenuhi keempat maksim dalam prinsip kerja sama, yaitu maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan pelaksanaan. Selain keempat maksim tersebut, dalam prinsip kerja sama masih diperlukan prinsip kesopanan yang terjabar dalam enam maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, maksim kesimpatian, dan maksim penerimaan atau pujian. Jika penutur dalam hal ini tim sukses masing-masing kandidat memenuhi maksim-maksim tersebut, akan terbentuk wacana kampanye politik yang efektif sehingga masyarakat sebagai lawan tutur memahami dan menangkap maksud dan tujuan penutur. Untuk menghasilkan wacana kampanye politik yang efektif, penutur dapat menyampaikan visi, misi, dan program unggulan calon kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, dkk. 2002. *Analisis Wacana: Dari Linguistik Sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Kanak.
- Brown, Gillian dkk. 1996. *Analisis Wacana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 1995. *Sosiolinguistik: Pengenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kushartanti, Untung Yuwono, dan Multamia BMT Lauder (ed). 2005. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, Geoffrey. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Lubis, Hasan Hamid. 1994. *Analisis Wacana Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Nadar, FX. 2009. *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R, Yayuk Eny. 2005. “Karakteristik Pemakaian Bahasa dalam Spanduk Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Yogyakarta”. Makalah pada FBS Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rohmadi, Muhamad. 2004. *Pragmatik Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Sianturi, Lidi Waty. 2011. “Implikatur dalam Wacana Kampanye Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2010–2015”. Skripsi pada Universitas Sumatera Utara.
- Soemarmo. 1987. “Pragmatik dan Perkembangan Mutakhirnya”. Makalah pada Seminar Tahunan Universitas Atmajaya.
- Sudaryanto. 1986. *Metode Linguistik: Bagian Pertama Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana Press.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi
- Wijaya, Marlina dan Euis Honiatri. 1997. *Intisari Tata Bahasa Indonesia Untuk SLTP*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Terj. Indah Fajar Wahyuni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Redaksi. 2013. “KPU Tetapkan Ganjar sebagai Gubernur Jateng”. <http://www.tempo.co>, diakses 20 Agustus 2013.

Sumber lain:

<http://www.kpu-jatengprov.go.id>
<http://www.ganjarheru.net>.